



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NURHAYATI MALLISA**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **69600**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/175 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 40 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **68.000.000**

1. MOBIL, FORD MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **45.500.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **246.923.830**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **660.423.830**

**III. HUTANG** Rp. **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **660.423.830**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2020/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SULIWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK
3. NHK : 781852

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	98.000.000
1. MOBIL, TOYOTA/ NEW AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	7.458.303
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	105.458.303
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	105.458.303

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Januari 2021**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SHERLI KARTIKASARI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 404736

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 6.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 99.870.416

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 360.870.416

**III. HUTANG** Rp. 142.018.954

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 218.851.462

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.